

# **SKRIPSI**

## **PERAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**



**OLEH :**

**ARMIKA**  
**10675005059**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2010**

## **PERAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

*Abstrak*

*Oleh  
Armika*

*Untuk memperkuat negara kesatuan dan memperlancar penyelenggaraan pembangunan nasional, pelaksanaan pembangunan di daerah harus didasarkan pada otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas desentralisasi dan tugas pembangunan.*

*Pajak daerah adalah salah satu sumber keuangan pemerintah dalam pembangunan daerah yang merupakan ukuran dari kemampuan suatu daerah untuk membiayai daerahnya, oleh karena itu perlu adanya usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan. Pajak daerah menempati tempat pertama dari pendapatan asli daerah karena sistem pemunggutannya perlu disempurnakan dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak daerah dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan rutin daerah dan membiayai pengeluaran dari kebutuhan pembagian di daerah itu, dengan kata lain daerah dituntut untuk dapat mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri.*

*Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah otonomi, maka dalam melaksanakan perannya Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Rokan Hilir, sebagai pelaksanaan daerah dibidang pendapatan atau keuangan daerah untuk mengelola pajak dan retribusi daerah. Dalam penelitian ini maka penulis langsung meneliti seluruh populasi dan sampel yang ada di kantor Dipenda alasannya karena mengingat jumlahnya tidak terlalu banyak yaitu 60 orang. Sedangkan pengambilan data primer dan skunder dilaksanakan dengan kegiatan penyebaran angket dan observasi kepada semua responden di kantor Dipenda, kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif. Berdasarkan tanggapan responden kemudian disajikan dalam bentuk tabel-tabel frekuensi*

*Kesimpulannya dari data-data yang dianalisa maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerimaan pajak daerah yang dilakukan pihak Dipenda Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana dengan optimal, dari kenyataan yang ada maka penulis menemukan jawabannya bahwa tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam penerimaan pajak daerah.*

## DAFTAR ISI

### LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### ABSTRAK

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi

### BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	9

### BAB II TELAAH PUSTAKA

II.1 Pengertian Administrasi .....	11
II.2 Pengertian Pajak Daerah.....	11
II.3 Pengertian Keuangan Daerah.....	17
II.4 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.....	19
II.5 Peran Dinas Pendapatan Daerah.....	21
II.6 Subjek dan objek pajak .....	22
II.7 Jenis-Jenis pajak .....	24
II.8 Konsep Operasional.....	25
II.9 Hipotesis .....	27
II.10 Variabel Penelitian .....	27

### BAB III METODEOLOGI PENELITIAN

III.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
III.2 Jenis dan Sumber Data .....	29
III.3 Populasi Sampel.....	29
III.4 Teknik Pengumpulan Data.....	30

III.5 Analisa Data.....	31
-------------------------	----

#### **BAB IV GAMBARAN UMUM**

IV.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir .....	32
IV.2 Jenis-jenis Penerimaan Pajak Daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir .....	51
IV.3 Keadaan Pegawai Serta Fasilitas kerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir .....	52

#### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

V.1 Identitas Responden.....	69
V.2 Peran Dinas pendapatan Kabupaten Rokan Hilir.....	60
V.3 Hambatan-hambatan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Rokan Hilir.....	83

#### **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

VI.1 Kesimpulan.....	85
VI.2 Saran .....	86

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **II.1 Pengertian Administrasi**

Menurut Sondang, P.Siagian (2003:4) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut Kumorotmo,(2005 : 342) administrasi adalah proses serangkaian kegiatan pemilihan alternatif tindakan atau pengambilan keputusan.

Dari pengertian diatas dapat ditegaskan bahwa administrasi mempunyai peranan penting ditengah kehidupan, tepatnya dalam rangka mencapai suatu tujuan karena administrasi adalah adanya sekelompok manusia yang terdiri atas adanya kerjasama yang baik.

Dengan demikian semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu merupakan suatu proses administrasi, termasuk juga kegiatan pemugutan pajak yang dilakukan oleh Dipenda Kabupaten Rokan Hilir melalui suatu sistem.

#### **II.2 Pengertian Pajak Daerah**

a. Menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tidak mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

b. Menurut Dr. P.J.A. Adriani (guru besar Hukum Pajak Universitas Amsterdam).

Pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak untuk membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

c. Menurut Adolph Wagener

pajak adalah pungutan yang dapat dipaksakan kepada masyarakat yang sebagian ditunjukan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bersifat umum, dan sebagian lagi untuk menyesuaikan perubahan pembagian pendapatan masyarakat.

d. Menurut Leroy Beaulieu

Pajak merupakan pungutan baik yang bersifat langsung yang dipungut oleh pemerintah dari penduduk atau barang, untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

e. Prof. Edwin R.A. Seligman

Pajak adalah Pungutan yang dapat dipakasakan oleh pemerintah kepada seseorang untuk membiayai pengeluaran yang timbul untuk kepentingan umum, tanpa dapat ditunjukan adanya jasa timbal yang dapat ditunjuk secara khusus.

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang menepatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penepatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan ritribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang. Pajak daerah dan Ritribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

1. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir kesektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
2. Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus" nya digunakan untuk "public saving" yang merupakan sumber utama membiayai "public investment"
3. Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum
4. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan

yang ditetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Sedangkan menurut Sumitro ( dalam Marsyahrul, 2005 : 2 ) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang ( yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak sifatnya memaksa dan dapat dipaksakan adapun ” Dapat dipaksakan mempunyai arti, apabila utang pajak tidak dibayar, utang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang, dan sandera. Dengan demikian, ada ciri-ciri pajak yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
- b. Jasa timbal tidak dapat ditunjukkan secara langsung
- c. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
- d. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.
- e. Dapat dipaksakan (bersifat yuridis).

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.



Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Pajak dan retribusi adalah merupakan sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya.

Pajak daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistem perpajakan indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

Salah satu kelemahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan PAD adalah kelemahan dalam pengukuran penilaian atas pugutan daerah, untuk mendukung upaya peningkatan PAD perlu diadakan pengukuran/penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesenambungan. Ada beberapa tolak ukur untuk menilai berbagai pajak daerah menurut Devasa (dalam buku Tjip Ismail 2007:44) sebagai berikut :

1. Hasil (Yeild)

Memadai tindaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil itu, dan dan elatisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

## 2. Keadilan (Equity)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenangnya, pajak harus adil secara horizontal, artinya badan pajak haruslah sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, adil secara vertikal artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar, dan pajak haruslah adil dari suatu daerah ke daerah lain kecuali memang suatu daerah mampu memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi.

## 3. Daya Guna ekonomi (Economic Efficiency)

Pajak hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil “beban lebih”

## 4. Kemampuan melaksanakan (Ability to Implement)

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan administrasi

## 5. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as a local Revenue Source)

Ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat pungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain, pajak daerah hendaknya tidak mempertanyakan perbedaan-perbedaan

antar daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

### **II.3 Keuangan Daerah**

Kondisi keuangan suatu daerah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Keuangan daerah mempunyai arti yang penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah diupayakan dapat berjalan berdaya guna dan berhasil. Keuangan daerah adalah kemampuan daerah untuk mengelola, mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan dengan kewenangan dalam rangka pelaksanaan atas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu di daerah yang diwujudkan dalam bentuk APBD. Masalah dasar keuangan daerah terkait erat dengan ekonomi daerah, terutama menyangkut tentang pengelolaan keuangan suatu daerah, tentang bagaimana sumber penerimaan digali dan didistribusikan oleh pemerintah daerah (Deves, 1995:179)

Prameter keberhasilan perkembangan daerah terefleksikan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan daerah. Potensi dana pembangunan yang paling besar dan lestari adalah bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan ritribusi daerah (Basri, 2003:94).

Di harapkan dimasa yang akan datang ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya diminalisasi guna meumbuhkan kemndirian

pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan. Peningkatan peran atau porsi PAD terhadap APBD tanpa membebani masyarakat dan investor merupakan salah satu indikasi keberhasilan pemda dalam melaksanakan otonomi daerah, yang lebih penting adalah bagaimana pemda mengelola keuangan daerah secara efisien efektif (Saragih, 2003:133).

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan yang mengali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber pendapatan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Tamrin Simanjuntak/Davey, 1998:95) Disisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari Pemerintahan Pusat. Oleh karena itu, bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peranan Pemerintahan Daerah dalam mengali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan

keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah (Halim, 2004: 21-22).

#### **II.4 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan mengali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar propinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan persyaratan sistim pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang digali murni dari masing-masing daerah, sehingga sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan dan prasarana pembangunan daerah yang tercermin dalam anggaran pembangunan.

Mengenai sumber pendapatan daerah diatur dalam pasal 5 Bab IV UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah, Sumber Pendapatan terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah yaitu: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan
- c. Pinjaman daerah

d. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian pajak daerah adalah ” Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah ”

## **II.5 Peran Dinas Pendapatan Daerah**

Menurut Suekanto (2005:260) peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat atau rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat

Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi

Menurut Wibawa (2000:81) peranan adalah keseluruhan hubungan perilaku seseorang dilihat dari fungsinya terhadap organisasi.

a. Memberikan bimbingan pembinaan terhadap wajib pajak

Bimbingan (Direktion) berarti memelihara, menjaga dan mengajukan organisasi melalui setiap personal, baik secara struktural maupun fungsional, agar setiap kegiatan tidak terlepas dari usaha mencapai tujuan.

Menurut Moh. Surya (1988 : 2) Bimbingan ialah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, perwujudan dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyusunan diri dalam lingkungan.

b. Melakukan Pendaftaran dan Pendataan terhadap wajib pajak

Kegiatan pendaftaran dan pendataan merupakan langkah awal yang harus dilakukan petugas secara optimal dan objektif dilapangan maupun dikantor, supaya seluruh potensi yang ada dapat tergali sehingga dapat menambah pemasukan jumlah pendapatan yang akan dipungut tentunya melalui penetapan pajak daerah tersebut.

Dalam artian lebih lanjut bahwa kegiatan pendaftaran dan penetapan pajak daerah yang dilakukan oleh petugas secara optimal akan menetapkan target penerimaan yang ideal karena sudah dipertimbangkan berdasarkan dengan data-data yang ada dan tentunya unit kerja bagian penetapan akan menerbitkan (surat ketetapan pajak daerah) SKPS terlebih dahulu

c. Melakukan pembukuan dan pelaporan hasil pembuatan pajak daerah

Kegiatan pembukuan dan pelaporan ini merupakan kegiatan yang mana petugas atau pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir melakukan pembukuan terhadap penerimaan pajak daerah dan pendataan lainnya berupa pembukuan objek pajak yang sudah terdata dan ditetapkan sebagai wajib pajak.

Sehingga dengan pembukuan tersebut petugas dapat menyusun target penerimaan dan mengevaluasi serta melaporkan realisasi penerimaan pajak yang sudah terdata.

d. Mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap penagihan pajak daerah.

Pengawasan merupakan usaha membantu setiap personil agar selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pengawasan dengan konsep seperti ini merupakan bagian tidak terpisah dari pengertian disiplin yang tumbuh dan berkembang karena kesadaran akan tugas dan tanggung jawab yang didasari oleh karna tertatanya moral yang tinggi. Jadi pengawasan dan pemeriksaan adalah tujuan yang ditetapkan sangat penting dan perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran pelaksanaan yang telah dilakukan dalam usaha pencapaian tujuan dalam penerimaan pajak daerah.

e. Melakukan penyuluhan pajak daerah, ritribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah.

Kegiatan penyuluhan merupakan program kerja dilapangan yang ditunjukan terhadap wajib pajak daerah, dalam rangka menyadarkan tentang arti pentingnya pajak daerah dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Sedangkan menyuluhan adalah suatu upaya bantuan yang dilakukan dengan empat mata atau suatu upaya tatap muka antara penyuluh dan klien (penyuluhan dan konseli) yang berisi usaha yang laris, unik dan manusiawi, yang dilakukan dalam suasana dan keahlian yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku agar klien memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri dalam memperbaiki tingkah lakunya pada saat ini dan mungkin pada masa yang akan datang.



## **II.6 Subjek dan Objek Pajak**

### **a. Subjek pajak**

Adalah orang pribadi dari badan yang menurut Undang-undang perpajakan dinyatakan sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan pajak. Sedangkan subjek pajak meliputi:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum berbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
4. Bentuk usaha tetap (BUT) ialah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Yang dapat berupa : Tempat kedudukan manajemen, Cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik bengkel dan lain-lain.

### **b. Objek Pajak dalam pasal 21 yaitu :**

1. Penghasilan yang diterima secara tertentu berupa : gaji, uang pensiun bulanan, upah, honor, tunjangan jabatan, dan tunjangan khusus

2. Penghasilan yang diterima secara tidak tertentu berupa : jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, bonus dan premi tahunan.
3. Uang tabungan hari tua, uang pesangon
4. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, beasiswa dan pembiayaan lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak.

c. Wajib Pajak

Wajib pajak ialah orang atau badan yang menurut ketentuan undang-undang yang berlaku ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak (PKP), yaitu menerima atau memperoleh penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Bagi wajib pajak dalam negeri. Dengan kata lain wajib pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif.

## **II.7 Jenis-jenis Pajak**

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 disebutkan bahwa jenis pajak daerah Kabupaten/kota terdiri dari :

1. Pajak hotel

adalah pajak atas pelayanan hotel Sedangkan hotel merupakan bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/beristirahat dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran. Termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki

oleh pihak yang sama kecuali pertokoan dan perkantoran. Tarif pajak hotel adalah 10 %

## 2. Pajak restoran

adalah atas pelayanan restoran. Restoran merupakan tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Tidak termasuk jasa bago atau ketrang. Tarif pajaknya sebesar 10 %

## 3. Pajak hiburan

adalah pajak atas semua jenis pertunjukan, permainan, atau keramaian dengan nama apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk fasilitas olah raga. Tarif pajaknya sebesar 35 %

## 4. Pajak reklame

adalah benda, alat, pembuatan, media menurut corak ragamnya untuk tujuan komersial. Tarif pajak reklame sebesar 25 %

## 5. Pajak penerangan jalan

adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Tarifnya sebesar 10 %

## 6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C

adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tarif pajaknya sebesar 20 %

## 7. Pajak parkir

adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang dipungut bayaran. Tarif pajak sebesar 20 %

Relatifnya rendahnya kemampuan daerah dalam mengali kapasitas pajak daerah disebabkan karena rendahnya pendapatan perkapita, rendahnya distribusi pendapatan, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan relatif lemahnya kebijakan perpajakan daerah.

## **II.8 Konsep Oprasional**

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini, perlu dikemukakan beberapa konsep oprasional sebagai berikut :

1. Pajak adalah pemugutan yang dilakukan daerah atas pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa dari pemerintah yang sifatnya dapat dipaksakan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Penerimaan dalam hal ini adalah kegiatan penerimaan pajak daerah yang dilakukan oleh dinas pendapatan kepada wajib pajak yang sudah terdata di Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat dan diberlakukan.
3. Pengaturan penerimaan pajak daerah adalah : adanya peningkatan dan penurunan pajak daerah di Kabupaten Rokan Hilir setiap tahunnya peningkatan atau penurunan hasil pajak daerah ini dapat diatur dari target dan realisasi yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah.

4. Melakukan Bimbingan pembinaan wajib pajak yaitu kegiatan dalam memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap wajib pajak daerah bertujuan untukmenyadarkan subjek dan objek pajak daerah dalam upaya

5. Sistem adalah suatu sarana untuk menguasai pekerjaan agar dalam melaksanakan tugas tersebut dapat dilakukan dengan teratur.

6. Pendaftaran dan Pendataan ialah suatu upaya pengumpulan dan penyusunan data mengenai seluruh aspek potensi objek dan subjek pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir secara objektif dan lengkap untuk selanjutnya dimasukan kedalam kartu data sehingga mempermudah proses penetapan target penerimaanya

7. Penetapan merupakan proses kegiatan yang dilakukan pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir untuk menetapkan target penerimaan pajak daerah secara bijaksana berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pendataan yang dilakukan.

9. Pembukuan dan Pelaporan yaitu kegiatan pencatatan data-data tentang wajib pajak daerah yang ada dikabupaten rokan hilir kedalam buku jenis pajak yang ada serta membuat laporan realisasi penerimaan.

10. Penyuluhan terhadap wajib Pajak yaitu merupakan program kerja dilapangan yang ditunjukan terhadap wajib pajak daerah dalam rangka menyadarkan tentang arti pentingnya pajak daerah dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak penyuluhan-penyuluhan dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah.

11. Dinas Pendapatan Rokan Hilir adalah suatu instansi pemerintahan sekaligus unsur pelaksanaan daerah dibidang pendapatan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan pajak daerah dan ritribusi daerah.

## **II.9 Hipotesis**

Hipotesis ini merupakan jawaban sementara terdapat masalah penelitian, jadi dari perumusan masalah dan tujuan penelitian diatas maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : **"Diduga Peran dinas Pendapatan Daerah dalam penerimaan pajak daerah belum berjalan maksimal.**

## **II.10 Variabel Penelitian**

Adapun yang menjadi variabel penelitian ini adalah Peran Dipenda yaitu:

- a. Melakukan bimbingan, pembinaan terhadap wajib pajaK
- b. Melakukan Pendaftaran dan Pendataan terhadap wajib pajak
- c. Melakukan pembukuan dan pelaporan hasil pembuatan pajak daerah
- d. Mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap penagihan pajak daerah.

Melakukan penyuluhan pajak daerah, ritribusi daerah.dan lain-lain pendapatan dari daerah

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **III.1 Lokasi dan waktu Penelitian**

Sesuai dengan judul dan masalah penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu dikantor dinas pendapatan daerah yang beralamat di jalan perniagaan Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan pada tanggal 26 april-26 mai 2010.

#### **III.2 Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : Data Primer dan data Sekunder. Data primer diperoleh langsung mengenai peran Dipenda dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku laporan dan catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **III.3 Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan anggota atau objek-objek yang menjadi fokus penelitian, Adapun populasi yang diambil dari penelitian ini adalah semua pegawai Dipenda sebanyak 60 orang yang terdiri dari :

1. Kepala Dipenda
2. Ka. Bag
3. Ka. Subag

4. Ka. Seksi

5. Ka. Sub Seksi

6. Pegawai

b. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus (100%) karena jumlahnya sedikit. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.1 Keadaan Populasi dan Sampel Pada Kantor Dipenda Kabupaten Rokan Hilir**

No	Sub populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dipenda	1	1	100
2	Ka. Bag	1	1	100
3	Ka. Subag	1	1	100
4	Ka. Seksi	5	5	100
5	Ka.sub. seksi	13	13	100
6	Pegawai	39	39	100
	Jumlah	60	60	100

*Sumber data : Kantor Dipenda Kabupaten Rokan Hilir*

#### **III.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Observasi Yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang ada di lokasi penelitian. Observasi bertujuan untuk mendapatkan



informasi awal dan data-data sekunder yang berkenaan dengan peran pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah

- b. Questioner atau angket Merupakan kegiatan pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan secara tertulis untuk diisi oleh responden sesuai dengan alternatif pertanyaan

### **III.5 Teknik Analisis Data**

Setelah data yang diperlukan terkumpul dan terklasifikasi menurut jenisnya maka selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif.

**BAB IV**  
**GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HILIR**

**IV.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir**

Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembagunaan didaerah yang merupakan salah satu tugas pokok pemerintah daerah sebagai perwujudan kegiatannya yaitu otonomo yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab maka pemerintah daerah kabupaten rokan hilir adanya keserasian dalam pengumpulan dana untuk membiayai pembangunan daerah.

Dinas pendapatan daerah sebagai aparat pelaksanan pemerintah daerah dengan salah satu tugas pokoknya melaksanakan dan mengkoordinir seluruh usaha dibidang pemungutan dan pendapatan daerah berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagai unsur pemerintah daerah. Dinas pendapatan daerah mempunyai tugas pokok melakukan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah baik terhadap sumber-sumber pendapatan yang telah ada maupun penggalian sumber-sumber baru.

Dinas pendapatan kabupaten rokan hilir dalam melaksanakan tugasnya dalam peraturan daerah No. 02 tahun 2002 tentang susunaan organisasi dan tata kerja dinas paendapatan daerah kabupaten rokan hilir. Pentingnya struktur organisasi bagi Dinas pendapatan rokan hilir adalah untuk memberi garis kewenangan terhadap setiap departemen kerja atau unit kerja yang ada secara tegas, sehingga dapat dipertanggung

jawabkan berdasarkan uraian tugas yang telah ditetapkan. Adapun fungsi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, Pemberian Bimbingan
- b. Pelayanan Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten
- c. Pembinaan teknis dibidang pemungutan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Pendaftaran, pendataan dan pemungutan pendapatan
- e. Penyusunan Program, pelaksanaan, pengkajian, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan serta penyuluhan pemungutan pendapatan daerah.
- f. Koordinasi teknis dan pemungutan seluruh usaha dibidang pemungutan retribusi dan pemungutan lainnya.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Daerah dengan tugas bidangnya.

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bagian Tata Usaha
4. Kepala Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan
5. Kepala Sub Dinas Penagihan dan Pembukuan
6. Kepala Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
7. Kepala Cabang

8. Kepala UPTD

9. Kelompok jabatan Fungsional

#### 1. Kepala Dinas

Tugasnya adalah seorang yang mengepalai Dispenda Kabupaten rokan hilir dengan kedudukan sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretariat daerah. Tugas dan fungsi kepala Dinas :

- a. Melaksanakan tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan
- b. Merumuskan kebijakan dibidang pendapatan Daerah
- c. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala daerah
- e. Bertanggung jawab mengkoordinasikan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam lingkungan dinas pendapatan Kabupaten Rokan Hilir

#### 2. Sekretariat

Tugasnya adalah menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kepala dinas.

fungsinya adalah :

- a. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan Dinas Pendapatan
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepegawaian dinas pendapatan
- c. Menyelenggarakan Administrasi keuangan dinas pendapatan

- d. Menyelenggarakan program dan perencanaan dinas pendapatan
- e. Bertanggung jawab mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan

### 3. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas adalah memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan dinas pendapatan daerah untuk melaksanakan tugasnya tersebut, sub bagian tata usaha terdiri dari :

- a. Sub bagian Umum dan kepegawaian

melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dinas pendapatan

Tugasnya adalah :

- a. Melakukan penyiapan tempat acara dan penyiapan pembuatan naskah
- b. Melakukan penyiapan pengarsipan dan ekspedisi
- c. Melakukan penyiapan penyelenggaraan dan pemeliharaan kebersihan
- d. Melakukan penyiapan penyusun rencana dan pembelian barang-barang
- e. Melakukan penyiapan pendataan inventaris barang, peralatan dan perbekalan
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai  
Melakukan penyiapan bahan bahan kesejahteraan pegawai
- g. Melakukan penyiapan penyusunan rencana pendidikan pelatihan serta penyiapan tugas rapat

- h. menyiapkan bahan dan memberikan penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya
  - i. Melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Sub bagian keuangan
- . Melakukan penyiapan bahan pengawasan anggaran, Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan administrasi keuangan.

Tugasnya adalah :

- a. Melakukan penyiapan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan administrasi keuangan
- b. Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan administrasi keuangan
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembina administrasi keuangan
- d. Melakukan inventarisasi laporan-laporan berkaitan dengan keuangan
- e. Merencanakan program kerja pengolahan biaya operasional rumah tangga dinas
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan cara menggunakan anggaran
- g. Melakukan penyiapan bahan pengawasan anggaran
- h. Melakukan penyiapan bahan penyelesaian tuntutan ganti rugi

- i. Menyiapkan bahan dan memberikan penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya
- j. Melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya

c. Sub bagian Perencanaan Program

Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan pengawasan penggunaan anggaran

- a. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan program
- b. Mengkoordinasi usulan setiap bidang, pengolahan data serta informasi tentang dinas
- c. Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan program menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan
- d. Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana dinas
- e. Melaksanakan pengawasan melekat atas tugas yang diemban sesuai dengan lingkup tugasnya
- f. Melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya

#### 4. Bidang pendapatan asli daerah

Yang mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan pendapatan dan penetapan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah, serta mengadakan pemeriksaan dan memberikan pelayanan keberatan atas ketetapan pajak dan retribusi daerah.

Fungsinya adalah :

- a. Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan pendataan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah
- b. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan penetapan subjek dan objek pajak dan retribusi daerah
- c. Mengadakan Pemeriksaan dan pelayanan keberatan atas ketetapan pajak dan retribusi daerah
- d. Bertanggung jawab mengkoordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya

Tugasnya adalah :

- a. Penyiapan bahan dan formulir serta melaksanakan penetapan pajak dan retribusi daerah
- b. Menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah



- c. Memberikan bimbingan dan penyusunan daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah
  - d. Menyiapkan naskah keputusan mengenai penyelesaian sengketa pajak dan retribusi daerah
  - e. Melakukan pemeriksaan, penyidikan pengawasan subjek maupun objek dan retribusi daerah
  - f. Menyiapkan laporan hasil pendataan, pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian serta penertiban atau penyegelan terhadap penyelenggaraan peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah
- a. Seksi Pendataan pajak dan Ritribusi

Yang mempunyai tugas adalah menghimpun, mengelola serta mencatat data objek maupun subjek pajak dan retribusi daerah.

Tugasnya adalah :

- a. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pendataan dan pendaftaran
- b. Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengolahan data wajib pajak dan retribusi serta informasi yang berhubungan dengan pendataan dan pendaftaran
- c. Melakukan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pendataan dan pendaftaran
- d. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah

- e. Melakukan pengawasan melekat terhadap tugas yang diemban sesuai ruang lingkup tugasnya
- f. Menyiapkan bahan dan memberikan penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya

b. Seksi Penetapan pajak dan Retribusi

Adalah menghitung menetapkan dan menertipkan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah dan penata ketetapan usaha

Tugasnya adalah :

- a. Melakukan penyiapan kumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penetapan dan pertimbangan keberatan
- b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penetapan dan pertimbangan keberatan
- c. Melakukan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan penetapan dan pertimbangan teknis
- d. Melakukan penertiban dan penyampaian pendistribusian surat ketetapan pajak serta retribusi daerah
- e. Menerima pengajuan permohonan keberatan dari wajib pajak dan retribusi daerah
- f. Menyiapkan bahan dan memberikan penyuluhan sesuai dengan bidang lingkup tugasnya

### c. Seksi Pemeriksaan

adalah Melayani keberatan atas ketetapan pajak dan retribusi daerah, serta mengadakan pemeriksaan penyidikan terhadap objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.

Tugasnya adalah :

- a. Melakukan penyiapan kumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penetapan dan pertimbangan keberatan
- b. Melakukan pengawasan melekat terhadap tugas yang diemban sesuai ruang lingkup tugasnya
- c. Melakukan penyiapan bahan penetapan usaha pelayanan keberatan atas permohonan banding terhadap wajib pajak
- d. Menerima pengajuan permohonan keberatan dari wajib pajak
- e. Menyiapkan bahan dan memberikan penyuluhan sesuai dengan bidang lingkup tugasnya

### 5. Bidang Pembukuan dan Penagihan

Ialah Melaksanakan pembukuan realisasi penerimaan, tunggakan dan pelaporan realisasi pendapatan daerah serta melaksanakan verifikasi dan penagihan terhadap pajak dan retribusi daerah yang telah jatuh tempo serta melakukan

pengelolaan benda berharga dan mengadakan koordinasi dengan unit kerja yang terkait dengan pendapatan daerah.

Fungsinya adalah :

- a. Penyiapan dan penyelenggaraan bahan tunggakan dan pelaporan realisasi pendapatan
- b. Menyenggarakan Pembukuan dan realisasi penerimaan
- c. Menyenggarakan verifikasi dan penagihan pihak dan retribusi daerah yang telah jatuh tempo
- d. Menyenggarakan pengelolaan benda berharga dan mengadakan koordinasi dengan unit kerja yang terkait dengan pendapatan daerah
- e. Membantu kepala dinas dalam bidang penagihan dan pembukuan
- f. Bertanggung jawab mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya

Tugas adalah :

- a. Menyiapkan bahan formulir serta melaksanakan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi daerah dan bagi hasil pajak dan bukan pajak
- b. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan pembukuan dan penagihan pajak dan retribusi daerah maupun bagi hasil pajak dan bukan pajak
- c. Penyusunan rencana kebutuhan akan benda berharga

- d. Memberikan bimbingan dan menyusun daftar tunggakan pajak dan retribusi daerah dan bagi hasil pajak dan bukan pajak

a. Seksi Pelaporan

Ialah menghimpun dan menyiapkan laporan realisasi, tunggakan dan mengelola benda berharaga

Tugasnya adalah :

- a. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan laporan
- b. Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaporan
- c. Melakukan penyiapan bahan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan atau pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah
- d. Melakukan pembukuan laporan tentang pendapatan daerah kepada seksi-seksi yang bersangkutan secara rutin

b. seksi Pembukuan dan Penerimaan

Adalah melakukan pembukuan realisasi penerimaan dan menyiapkan daftar tunggakan pajak dan retribusi pendapatan daerah.

Tugasnya adalah :

- a. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembukuan dan verifikasi
  - b. Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaporan
  - c. Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pembukuan dan verifikasi
  - d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/Istansi terkait dengan bidangnya tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas
  - e. Menyiapkan bahan-bahan laporan secara periodik
- c. Seksi Penagihan dan Perhitungan

Adalah mengumpulkan dan mengolah data penunggak serta menghitung dan melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah

Tugasnya adalah :

- a. Melakukan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penagihan
  - b. Melakukan perhitungan untuk seluruh tunggakan pajak dan retribusi daerah baik dari perusahaan maupun dinas atau instansi yang terkait
  - c. Melakukan penyiapan bahan laporan secara periodik atas perkembangan penagihan tunggakan
6. Bidang Bagi hasil Pendapatan

Adalah Melaksanakan penata usahaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak serta pajak bumi dan bangunan. S

Tugasnya adalah :

- a. Menghimpun Data bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak bumi dan bangunan
- b. Memantau pelaksanaan penagihan bagi hasil pajak serta pajak bumi dan bangunan
- c. Melakukan koordinasi bidang pendataan, penetapan, pendataan, penetapan serta penyampaian
- d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya

Tugasnya adalah :

- a. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pembukuan dan pelaporan penerimaan bagi hasil bukan pajak dan pajak bumi dan bangunan mengkoordinasi, membina dan merumuskan laporan realisasi penerimaan pajak bagi hasil

a. Seksi Bagi Hasil Pajak

Adalah melaksanakan penyiapan bahan koordinasi serta menghimpun data dan penatausahaan bagi hasil pajak, meneliti penyetoran realisasi dan tunggakan.

Tugasnya adalah :

- a. Memantau penerimaan dan tunggakan Bagi hasil pajak
- b. Membuat realisasi penerimaan dan tunggakan bagi hasil pajak yang menjadi hak daerah setiap bulanya
- c. Menghimpun data dan penata usahaan bagi hasil pajak

- d. Menyiapkan bahan dan memberikan penyuluhan sesuai dengan bidangnya
- e. Melakukan pengawasan melekat terhadap tugas yang diemban sesuai ruang lingkup tugasnya

b. Seksi Bagi Hasil Bukan pajak

Adalah melaksanakan penyiapan bahan koordinasi,serta menghimpun data penatausahaan bagi hasilbukan pajak, meneliti penyetoran, realisasi dan tunggakan.

- a. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakn teknisi, pedoman dan petunjuk teknisi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penatausahaan penerimaan bagi hasil bukan pajak
- b. Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penatausahaan penerimaan bagi hasil bukan pajak
- c. Melakukan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penatausahaan penerimaan bagi hasil bukan pajaK
- d. Membuat surat permintaan transfer bagi yang menjadi hak dearah kekas daerah
- e. Membuat realisasi penerimaan bagi hasil pajak yang menjadi hak daerah setiap bulannya
- f. Menyiapkan bahan dan memberikan penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya

c. Seksi pajak bumi dan bagunaan



Melaksanakan penatausahaan untuk persiapan administrasi penyampaian SPPT PBB, pemungutan dan penagihan SPPT PBB, memantau penerimaan setoran PBB, melakukan koordinasi dengan kantor pelayanan pajak pratama, melakukan koordinasi dengan UPT dinas pendapatan, kecamatan, kelurahan dan kepenghuluan serta membuat laporan realisasi penerimaan

Tugasnya adalah :

- a. Melaksanakan persiapan-persiapan administrasi untuk penyiapan SPPT PBB kecamatan, kelurahan dan kepenghuluan
- b. Melakukan kegiatan pemungutan langsung kepada wajib pajak dan mengkoordinasikannya dengan kecamatan, kelurahan dan kepenghuluan
- c. Melakukan monitoring penerimaan setoran PBB di UPT dinas pendapatan, kecamatan, kelurahan dan kepenghuluan
- d. Membuat realisasi penerimaan dan memberikan laporan kepada Tim Intensifikasi PBB
- e. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan tentang pajak bumi dan bangunan baik tingkat kabupaten dan kepenghuluan
- f. Melaksanakan rapat koordinasi dengan kantor pelayanan pajak pratama dengan melibatkan kabupaten, kecamatan dan kepenghuluan

#### 7. Bidang Perencanaan Pendapatan

Melaksanakan perencanaan dan bimbingan teknis kepada seluruh satuan organisasi pelaksana dinas dalam rangka pencapaian kegiatan yang berkaitan dengan objekpajak/ retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan yang ada

dan sumber-sumber pendapatan yang baru dengan mengacu kepada ketentuan /peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsinya adalah :

- a. Menyiapkan data objek pajak/ retribusi yang ada di kabupaten Rokan Hilir
- b. Menyusun kegiatan yang diperlukan untuk terciptanya penerimaan pendapatan secara maksimum dengan mengadakan analisis, evaluasi pemantauan (monitoring) terhadap objek pajak/retribusi daerah dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak/retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- c. Melaksanakan segala usaha koordinasi kegiatan pemungutan pengumpulan dana pemasukan pendapatan daerah, baik sumber pendapatan daerah yang ada maupun sumber pendapatan daerah yang baru
- d. Membantu merumuskan naskah rancangan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah tentang pajak dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya

Tugasnya adalah :

- a. Membantu kepala dinas dibidang perencanaan dan bimbingan teknis kepada seluruh organisasi pelaksana dinas
- b. Mengkaji dan menelaah sumber-sumber penerimaan yang baru sehingga dapat dikembangkan sebagai potensi penerimaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
- c. Melaksanakan koordinasi kerja dengan bidang-bidang yang berhubungan dengan perencanaan pendapatan

d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala dinas

a. Seksi peningkatan pendapatan Asli Daerah

Merencanakan upaya-upaya pelaksanaan intensifikasi/ekstensifikasi pemungutan pendapatan daerah dan melakukan pembinaan pelaksanaan dan tata hubungan kerja

Tugasnya adalah :

- a. Menyusun rencana pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya
- b. Mengusahakan intensifikasi pemungutan pendapatan daerah
- c. Melakukan pembinaan pelaksanaan hubungan kerja dan tata hubungan serta pembinaan penggunaan sarana dan prasarana perpajakan, retribusi dan pendapatan daerah lainnya

b. Seksi Pengembangan Pendapatan

Ialah mengumpulkan, mengolah, menganalisis, evaluasi dan mengadakan perbaikan secara berkesinambungan sistem pemantauan untuk mendapatkan data perpajakan retribusi dan pendapatan daerah

- a. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis sumber pajak/retribusi daerah untuk mengidentifikasi permasalahan pajak/retribusi daerah dan pendataan daerah lainnya
- b. Mengadakan evaluasi atas pelaksanaan tata kerja dan evaluasi atas realisasi pendapatan daerah

- c. Mengada perbaikan secara berkesenambungan sistem pemantauan untuk mendapatkan perpajakan/retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- d. Melaksanakan kajian terap untuk pengembangan penerimaan pendapatan asli daerah

c. Seksi Perundang-undangan

Ialah menghimpun semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pendapatan daerah, mengadakan pengkajian untuk meningkatkan penerimaan pendapatan

Tugasnya adalah :

- a. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penatausahaan penerimaan pajak dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- b. Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penatausahaan penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya
- c. Melakukan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penatausahaan penerimaan pajak dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lain melakukan penyiapan koordinasi dengan unit kerja/istansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk peningkatan dan kelancaran penerimaan pendapatan daerah

- d. Melakukan penyiapan bahan untuk perubahan tarif pajak dan retribusi daerah serta penyusunan rancangan peraturan daerah (PERDA), keputusan Bupati dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tentang administrasi dan operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- e. Melakukan penyiapan bahan usul perubahan tarif pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta penyiapan rancangan perubahan peraturan daerah

#### 8. UPTD

Tugasnya adalah :

- a. Membantu melaksanakan tugas-tugas dinas meliputi pendataan dan pemungutan wajib/ pajak retribusi dan memberikan informasi kepada dinas terhadap sumber-sumber pendapatan yang potensial yang berada diwilayahnya, merupakan perpanjangan tangan dinas pendapatan untuk wilayah kecamatan
- b. Membuat laporan penerimaan atas pungutan wajib pajak /wajib retribusi
- c. Menyetorkan penerimaan pajak dan retribusi ke dinas pendapatan melalui bendahara penerima
- d. Melaksanakan tugas yang diberikan disertai dengan pertanggungjawaban

### **IV.2 Jenis-jenis Penerimaan Pajak Daerah yang dikelola Dinas Pendapatan**

#### **Kabupaten Rokan Hilir**

Pada uraian terdahulu lebih dikemukakan bahwa sumber-sumber Pendapatan asli Daerah itu sendiri 4 golongan besar yaitu : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

Pengolahan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah menurut peraturan perundang-undangan setiap golongan tersebut meliputi beberapa komponen, walaupun begitu menurut kenyataannya tidaklah semua komponen tersebut dapat dikelola oleh setiap pemerintah daerah. Ini disebabkan oleh kemampuan daerah yang juga juga terbatas oleh keadaan atau potensi daerah yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Hal ini juga keterbatasan jenis penerimaan atau sumber pendapatan yang ada pada daerah tersebut.

Sehubungan dengan hal diatas, maka jenis penerimaan pendapatan daerah pada Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2002 dan peraturan daerah dapat ditetapkan sebagai berikut :

#### 1. Pajak Daerah

- a. Pajak Hotel : perda No. 12 Tahun 2004
- b. Pajak Restoran : perda No. 11 Tahun 2004
- c. Pajak Reklame : perda No. 13 Tahun 2004
- d. Pajak Hiburan : perda No. 14 Tahun 2004
- e. Pajak Penerangan Jalan : perda No. 26 Tahun 2004
- f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan bahan galian C : perda No. 32 Tahun 2002

#### 2. Pembiayaan

Pembiayaan Dinas Pendapatan Daerah disediakan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat dan lembaga lain diluar pemerintah daerah yang sah.

### **IV.3 Keadaan Pegawai Serta Fasilitas kerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir**

Kelancaran pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan tidak terlepas dari eksistensi para pegawai atau tenaga kerja yang berperan sebagai penggerak organisasi itu sendiri bahkan merupakan syarat mutlak bagi setiap organisasi, karena pegawai adalah sumber daya utama dalam organisasi.

Ini berarti, organisasi dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir memiliki sejumlah personil tenaga kerja yang menjadi penggerak organisasi berhubungan dengan pencapaian penerimaan daerah bagi pemasukan keuangan daerah, yakni kepegawaian yang teridentifikasi melalui tingkat pendidikan, masa kerja serta pangkat atau golongan.

Hal ini dapat dimaklumi, karena optimalisasi tujuan tersebut tidak diukur oleh kuantitas pegawai semata melainkan kualitas pegawai dengan segenap kemampuan dan kecakapan kerjanya, loyalitas dan tanggung jawab, sehingga tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik.

#### **1. Tingkat Pendidikan**

Bagi organisasi dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang sudah melakukan pembukuan tenaga kerjanya. Tuntutan akan tingkat pendidikan adalah penting sekali untuk dicermati oleh setiap pegawai yang ada, karena tanpa pendidikan pegawai sudah merealisasi tugas-tugas kompleks itu apalagi jumlah pegawai sudah diperkecil dibanding tiga tahun lalu.

Kenyataan tingkat pendidikan pegawai Dipenda sangat penting artinya ditengah pencapaian tujuan organisasi, karena dengan bekal pendidikan yang dimiliki pegawai mampu memahami tugas dan tanggung jawab yang diberikan serta mengaplikasikan secara efektif dan efisien, mengingat dalam pendidikan memuat berbagai ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan guna mempercepat proses oprasionalnya.

Faktor pendidikan pegawai dinas pendapatan daerah yang mengemban fungsi sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah itu berimplikasi lebih lanjut terhadap pangkat dan golongannya. Untuk mengetahui lebih jelas tingkat pendidikan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.I Keadaan Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dipenda**

**Kabupaten Rokan Hilir**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	persentase
1	Sarjana S2	1	1,66
2	Sarjana SI	15	25,1
3	Sarjana D3	4	6,66
4	Tamatan SLTA	37	61,6
5	Tamatan SLTP	2	3,33
6	Tamatan SD	1	1,66
	Jumlah	60	100

*Suber : Kantor Dipenda Kab Rokan Hilir 2010*



Dari tabel diatas dapat diketahui tingkat pendidikan pegawai Dipenda umumnya cukup memadai, yakni terdapat 1 orang pegawai yang berpendidikan S2, kemudian 15 pegawai tamatan SI, dan diikuti dengan 4 pegawai yang tamatan D3, kemudian terdapat sebanyak 37 orang pegawai yang berpendidikan SLTA, 2 orang pegawai berpendidikan SLTP dan yang berpendidikan SD 1 orang.

## **2. Pangkat dan Golongan**

Konsekwensi penguasaan pegawai terhadap berbagai ilmu pengetahuan yang terangkum melalui tingkat pendidikannya itu berimplikasi pada jabatan yang diduduki dalam pangkat dan golongan yang diharapkan, karena pada umumnya orang bekerja pastimenginginkan kedudukan yang memberikan jaminan dan status sosial yang lebih baik.

Mengenai pangkat dan golongan yang dimiliki pegawai Dipenda Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.2 Keadaan Pegawai menurut Pangkat dan Golongan pada Kabupaten Rokan Hilir.**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
----	---------	----------	--------

1	Pembina Tingkat 1	IV/ c	1
2	Penata tingkat 1	IV/ a	2
3	Penata muda TK 1	III/ d	4
4	Penata muda	III/ c	11
5	Pengatur tingkat 1	III/ b	2
6	Pengatur	III/ a	9
7	Pengatur muda TK 1	II/ b	18
8	Pengatur muda	II/ a	13
	Jumlah		60

*Sumber : Kantor Dipenda Kab Rokan Hilir 2010*

### **3. Masa Kerja**

Kematangan pola pikir dan sikap seorang pegawai yang mengeban tugas bidang pendapatan daerah juga ditandai dengan lamanya masa kerja yang sudah dilalui disamping faktor pendidikannya, karena bagaimanapun masa kerja mampu memberikan pengalaman-pengalaman yang sangat bermanfaat bagi seorang pegawai Dipenda Rokan Hilir dalam melaksanakan tugasnya.

Argumen diatas dapat dipahami, bahwa semakin lama masa kerja yang telah dilalui maka akan semakin banyak pengalaman kerjanya, sehingga tugas yang akan diberikan dapat diselesaikan dengan baik, bahkan permasalahan dihadapi dapat

dipecahkan secara bijaksana. Untuk mengetahui lebih jelas masa kerja pegawai Dipenda dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel IV .3 Keadaan pegawai berdasarkan masa kerja pada kantor Dipenda Kabupaten Rokan Hilir**

No	Masa kerja	Jumlah
1	10-15 tahun	8
2	16-20 tahun	23
3	21-25 tahun	20
4	26 keatas	9
	Jumlah	60

*Sumber : Kantor Dipenda Kabupaten Rokan Hilir 2010*

#### 4. fasilitas kerja

Fasilitas pegawai tentunya memiliki keterbatasan untuk melakukan seluruh tugas dan fungsi yang diberikan, oleh karena itu diperlukan kelengkapan fasilitas kerja yang dapat membantu kelancaran tugas yang dimaksud sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam hubungan dan tujuan yang diharapkan.

Bagi organisasi seperti Dipenda Kabupaten Rokan Hilir, ketersediaan berbagai fasilitas kerja mutlak diperlukan guna mendukung pelaksanaan tugas pegawai baik yang menyangkut kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan, karena tugas yang diembankan Dipenda Rokan Hilir sangat kompleks dan luas ruang lingkupnya, sedangkan organisasi tidak hanya mengandalkan tenaga manusia semata.

Mengenai fasilitas kerja yang dimiliki oleh Dipenda Rokan Hilir dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel IV.4 Keadaan Fasilitas Kerja Kantor dipenda Rokan Hilir**

No	Nama Barang	Jumlah	baik	Sedang	Rusak	Kebutuhan	Ket
1	Gedung kantor	1 unit	x	-	-	1 unit	-
2	Tanah Bagunan kantor	1 bidang	x	-	-	1 bidang	-
3	Kendaraan Roda 4	2 unit	x	-	-	3 unit	1 unit
4	AC Plet	8 unit	7 baik	-	1 unit	9 unit	1 unit
5	AC Window	2 unit	-	-	-	1 unit	-
6	Computer Unix (IBM)	10 unit	-	x	-	10 unit	-
7	PC Komputer	6 unit	x	-	-	9 unit	3 unit
8	Printer IBM sisdur Mapatda	7 unit	-	x	-	7 unit	-
9	Printer Epson LQ 2170	3 unit	2 baik	-	1 unit	4 unit	1 unit
10	Lap Top Computer	4 unit	x	-	-	6 unit	2 unit
11	Printer Laserjet Canon	4 unit	x	-	-	4 unit	-
12	Dispenser	2 unit	x	-	-	3 unit	1 unit
13	Bran Cass	2 unit	1 baik	-	1 unit	2 unit	-
14	Ruang Rapat Kadis	1 ruang	x	-	-	1 ruang	-
14	Ruang Rapat Staf	1 ruang	x	-	-	1 ruang	-
16	Papan Data Boar	1 unit	x	-	-	1 unit	-
17	Ganggang Telepon	1 unit	x	-	-	1 unit	-
18	Ac Spilit	2 unit	x	-	-	3 unit	-
19	Kursi Komputer	5 unit	x	-	-	5 unit	-
20	Filling Kabinet	3 unit	x	-	-	3 unit	-
21	Printer Inkjet	1 unit	-	x	-	1 unit	-
22	Kendaraan roda dua	1 unit	x	-	-	2 unit	1 unit

*Sumber : Kantor Dipenda Kabupaten Rokan Hilir 2010*

Berdasarkan hasil perincian sarana dan prasarana yang tercatat sampai tahun 2009, maka dapat dinyatakan bahwa ketersediaan fasilitas kerja masih belum memadai dan perlu kiranya dapat diperhatikan untuk masa yang akan datang, karena kekurangan fasilitas kerja sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas apalagi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara optimal.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **V.1 Identitas Responden**

Berikut ini penulis akan memaparkan beberapa identitas responden dan hasil penelitian diantaranya terdiri dari : keadaan responden menurut golongan, dan pangkat atau jabatan.

Berdasarkan data yang diperoleh Identitas responden dilihat dari tingkat golongan pada Dipenda kab.Rokan Hilir

**Tabel V.1 Keadaan Responden ditinjau dari tingkat golongan**

No	Golongan	Jumlah	%
1	Golongan I	2	2,33
2	Golongan II	35	48, 25
3	Golongan III	20	35, 25
4	Golongan IV	3	5,08
	Jumlah	60	100

Sumber : Kantor Dipenda Kabupaten Rokan Hilir 2010

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden pada Dipenda Kabupaten Rokan Hilir berada pada tingkat golongan II yakni berjumlah 38 orang (48,25) dan golongan III sebanyak 24 orang (35,25) hal ini menunjukan tingkat kesejahteraan rata-rata pegawai dipenda cukup baik.

Sedangkan untuk mengetahui jenjang pendidikan para pegawai Dipenda maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel V. 2 Keadaan Responden Berdasarkan Pangkat dan Jabatan**

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Kepala Dinas	V. A	1
2	Kepala Sub Bagian	IV. A	1
3	Kepala Seksi	IV. A	6
4	Kepala Sub Seksi	IV. A	15

*Sumber : Olahan Data Dari Hasil Penelitian Tahun 2010*

## **V.2 Peran Dipenda Dalam Penerimaan Pajak Daerah**

Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugasnya berada sepenuhnya dan bertanggung jawab kepada daerah. Untuk itu kepada dinas pendapatan daerah dituntut agar melaksanakan tugasnya dalam penerimaan pajak daerah. Dinas Pendapatan Daerah melakukan usaha agar dilaksanakan berjalan dengan baik.

Pajak daerah adalah suatu sumber pendapatan asli daerah dimana pajak daerah termasuk salah satu penerimaan daerah yang potensial yang penerimaannya dapat dijadikan dana pembangunan, oleh karena itu penanganannya harus serius sehingga penerimaan dari pajak daerah tersebut betul-betul dapat meningkatkan dan dapat dijadikan sebagai sumber dana dalam pembangunan dan pelaksanaan roda pemerintah.

Pajak daerah berkembang sesuai dengan perkembangan daerah tersebut namun kenyataan penerimaan pajak daerah selalu mengalami penurunan dan realisasi penerimaannya kurang dari target yang ditetapkan. Untuk itu peran Dipenda perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dilakukan dalam penerimaan pajak daerah, karena tanpa adanya peran Dipenda tersebut maka penerimaan tidak akan meningkat.

Dalam tabel ini penelitian membahas seluruh tanggapan 66 orang Responden tentang peran Dipenda dalam meningkatkan pajak daerah.

### **1. Melakukan Bimbingan Pembinaan terhadap Wajib Pajak**

Pelaksanaan yang telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pihak Dipenda melakukan bimbingan yang merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Karena melalui bimbingan dan pembinaan inilah objek pajak akan menyadari pentingnya pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Kegiatan dalam memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap wajib pajak daerah bertujuan untuk menyadarkan subjek dan objek pajak daerah dalam upaya meralisasikan pentingnya pajak dan pihak dipenda dan senantiasa bersungguh-sungguh melihat potensi-potensi objek pajak yan ada, dengan kata lain Dinas Pendapatan Daerah selaku pihak yang berwenag dalam mengelola penerimaan pajak daerah dapat meakukan pembinaan bimbingan secara optimal sehingga penetapan target penerimaan melalui pajak daerah dinilai sangat penting.



Adapun kegiatan dalam melakukan bimbingan pembinaan terhadap wajib pajak daerah yang dilakukan oleh pihak Dipenda dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel V.3 Tanggapan Responden Apakah Kegiatan Bimbingan Pembinaan terhadap wajib pajak daerah telah dilakukan**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	18	30%
2	Kadang-kadang	18	30%
3	Tidak	24	40%
	Jumlah	60	100 %

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari tabel di atas menggambarkan peran Dipenda dalam melakukan bimbingan, pembinaan terhadap wajib pajak daerah yang dilakukan Dipenda yakni dari 60 Responden terdapat 18 responden (30%) mengatakan iya, 18 responden (30%) mengatakan kadang-kadang, dan 24 Rresponden (40%) mengatakan tidak. Hal ini dapat dilihat bahwa peran dipenda dalam melakukan bimbingan pembinaan belum berjalan maksimal.

Sedangkan untuk mengetahui sejauh mana petugas dipenda dalam mendatangi setiap wajib pajak daerah dalam melakukan pembinaan terhadap wajib pajak, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.4 Tanggapan Responden Apakah Dipenda Mendatangi Setiap Wajib SPajak Daerah Yang Ada Secara Rutin Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Wajib Pajak**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	4	6,6%
2	Kadang-kadang	12	20,1%
3	Tidak	44	73,3%
	Jumlah	60	100 %

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari tabel di atas yakni dari 60 Responden terdapat 44responden (73,3%) mengatakan tidak, 12 responden (20%) mengatakan kadang-kadang, dan hanya 4 Rresponden(6,6%) mengatakan iya. Hal ini dapat dilihat bahwa peran dipenda dalam melakukan bimbingan pembinaan belum berjalan baik karena pihak Dipenda belum bisa berperan dalam memberi bimbingan pembinaan langsung terhadap wajib pajak.

Sedangkan untuk mengetahui apakah pembinaan yang dilakukan pihak Dipenda sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.5 Tanggapan Responden Apakah pembinaan yang dilakukan pihak Dipenda sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	20	33,3%
2	Kadang-kadang	24	40,1%
3	Tidak	16	26,6%
	Jumlah	60	100 %

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari tabel di atas yakni dari 60 Responden terdapat 20 responden (33,3%) mengatakan iya, 24 responden (40,1%) mengatakan kadang-kadang, dan hanya 16 Rresponden(26,6%) mengatakan tidak. Hal ini dapat dilihat bahwa peran dipenda

dalam melakukan bimbingan pembinaan belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Sedangkan untuk mengetahui apakah wajib pajak mau diberi bimbingan pembinaan dari Dipenda. ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.6 Tanggapan Responden Apakah wajib pajak mau di beri Bimbingan Pembinaan dari Dipenda.**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	16	26,6%
2	Kadang-kadang	22	36,6 %
3	Tidak	22	36,6 %
	Jumlah	60	100 %

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari tabel di atas yakni dari 60 Responden terdapat 16 responden atau (26,6%) mengatakan iya, sedangkan 22 responden (36,6%) mengatakan kadang-kadang, dan 22 Rresponden atau (36,6%) mengatakan tidak. Hal ini dapat dilihat bahwa peran dipenda dalam melakukan bimbingan pembinaan kepada wajib pajak kurang ditanggapi oleh wajib pajak.

Sedangkan untuk mengetahui apakah kegiatan pembinaan wajib pajak sudah dilakukan dengan baik, ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.7 Tanggapan Responden Apakah Kegiatan Pembinaan Wajib Pajak Sudah dilakukan Dengan Baik**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	11	18,3%
2	Kadang-kadang	20	33,3%
3	Tidak	30	50,1%
	Jumlah	60	100 %

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari tabel di atas yakni dari 60 Responden terdapat 11 responden atau (18,3%) mengatakan iya, sedangkan 20 responden (33,3%) mengatakan kadang-kadang, dan terdapat 30 Rresponden atau (50,1%) mengatakan tidak. Hal ini dapat dilihat bahwa peran dipenda dalam melakukan kegiatan pembinaan terhadap wajib pajak belum dilakukan dengan baik.

**Tabel V.8 Rekapitulasi Bimbingan Pembinaan Terhadap Wajib Pajak**

No	Pertanyaan	Kategori penilaian			Jumlah
		Iya	Kadang-kadang	Tidak	
1.	Apakah kegiatan bimbing-an pembinaan terhadap Wajib pajak daerah telah dilakuka	18 30%	18 30%	24 40%	60 (100%)
2	Apakah Dipenda mendata- ngi setiap wajib pajak da- erah yang ada secara rutin dalam melakukan pemin- aan terhadap wajib pajak	4 6,6%	12 20,1%	44 73,3%	60 (100%)
3	Apakah pembinaan yang dilakukan pihak Dipenda sesuai dengan peraturan yang ditetapkan	20 26,6%	24 40,1%	16 33,3%	60 (100%)
4	Apakah wajib pajak mau diberi bimbingan pembina-an dari dipenda	16 33,3%	22 36,6%	22 26,6%	60 (100%)
5	Apakah kegiatan pembina-an	11	20	30	60

	wajib pajak sudah dilakukan dengan baik	16,6%	33,3%	50,1%	(100%)
	Jumlah	113,1	160,1	223,3	100%
	Rata-rata	22,63	32,02	44,66	100%

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari hasil rekapitulasi tabel diatas dapat diketahui peran dipenda dalam memberikan bimbingan terhadap wajib pajak Dari tabel di atas yakni dari 60 Responden terdapat 22,63% responden yang mengatakan iya, sedangkan 32,02% responden mengatakan kadang-kadang, dan terdapat 44,66% Rresponden mengatakan tidak. Hal ini dapat dilihat bahwa peran dipenda dalam melakukan kegiatan pembinaan terhadap wajib pajak belum dilakukan dengan baik.

## **2. Melakukan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah**

Dalam upaya meningkatkan penerimaan hasil pajak daerah, maka pendaftaran dan pendataan merupakan langkah-langkah yang harus diperhatikan karena dari sekian banyak subjek dan objek pajak dapat diakumulasi dari data-data mengenai seluruh potensi yang ada dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Rokan Hilir. Itu artinya dalam melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah.

Dipenda dalam melakukan organisasi yang berwenang mengelola penerimaan daerah dapat mengumpulkan seluruh data-data yang berkaitan dengan potensi subjek dan objek pajak

Untuk mengetahui pelaksanaan dalam melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah terlaksana atau tidak terlaksana. Dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel V.9 Tanggapan Responden Apakah Pendaftaran Wajib Pajak Sesuai Dengan Kenyataan Yang Ada dilapangan**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	25	41,6%
2	Kadang-kadang	33	55,1%
3	Tidak	2	3,3%
	Jumlah	60	100 %

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Tabel diatas menunjukkan bagaimana mekanisme dalam penerimaan pajak daerah melalui proses dalam melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah, yakni dari 60 Responden terdapat 25 responden (41,6%) mengatakan iya, sedangkan 33 responden (55,1%) mengatakan kadang-kadang dan hanya 2 responden (3,3%) mengatakan tidak.

Sedangkan untuk mengetahui apakah subjek pajak sudah terdata secara keseluruhan di Kabupaten Rokan Hilir. Dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel V.10 Tanggapan Responden Apakah Seluruh Subjek Pajak Sudah Terdata Secara Keseluruhan di Kabupaten Rokan Hilir**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	17	28,3%
2	Sebagian	23	38,3 %
3	Tidak	20	33,3%
	Jumlah	60	100 %

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 60 responden terdapat sebanyak 17 responden (28,3%) mengatakan iya, sedangkan 23 responden (38,3%) mengatakan

sebagian dan 20 responden (33,3%) mengatakan tidak, hal ini dapat dilihat bahwa pendataan dan pendaftaran wajib pajak yang dilakukan Dipenda belum sepenuhnya terdata di Kabupaten Rokan Hilir.

Sedangkan untuk mengetahui apakah diadakan penyusunan secara objektif oleh pihak Dipenda berdasarkan kenyataan yang ada. Ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel V.11 Tanggapan Responden Apakah diadakan Penyusunan Secara Objektif Oleh Pihak Aparat Berdasarkan Kenyataan Yang Ada**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	30	50%
2	Kadang-kadang	18	30%
3	Tidak	12	20%
Jumlah		60	100 %

*Sumber: Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 60 responden terdapat sebanyak 30 responden (50%) mengatakan iya, sedangkan terdapat 18 responden (30%) mengatakan kadang-kadang dan 12 responden (20%) mengatakan tidak, hal ini dapat dilihat bahwa penyusunan secara objektif belum sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena hanya 20% yang mengatakan bahwa penyusunan sudah diadakan berdasarkan kenyataan yang ada berarti pihak Dipenda dalam melakukan kegiatannya banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Sedangkan untuk mengetahui apakah pengumpulan data telah dilakukan secara optimal dan objektif terhadap setiap subjek dan objek pajak yang ada. Ini dapat dilihat dari tabel berikut

**Tabel V.12 Tanggapan Responden Apakah Pengumpulan Data Tersebut Telah dilakukan Secara Optimal dan Objektif Terhadap Setiap Subjek dan Objek Oajak Yang Ada.**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	24	40,1%
2	Kadang-kadang	22	36,6 %
3	Tidak	14	23,3%
	Jumlah	60	100 %

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari tabel diatas dari 60 responden terdapat sebanyak 24 responden (40,1%) mengatakan iya, sedangkan 22 responden (36,6%) mengatakan kadang-kadang dan hanya 14 responden (23,3%) mengataka tidak.

Sedangkan untuk mengetahui apakah pihak Dipenda pernah salah dalam penulisan identitas wajib pajak. Ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel V.13 Tanggapan Responden Apakah Pihak Dipenda Pernah Salah Dalam Penulisan Identitas Wajib Pajak**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	10	16,6%
2	Kadang-kadang	15	25,1 %
3	Tidak	35	58,3%
	Jumlah	60	100 %

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari tabel diatas dari 60 responden terdapat sebanyak 10 responden (16,6%) mengatakan iya, sedangkan 15 responden (25,1%) mengatakan kadang-kadang dan hanya sedikit 35 responden (58,3%) mengataka tidak.

Lebih dari 50% mengatakan bahwa pihak Dipenda pernah salah dalam menulisan identitas wajib pajak, seharusnya pihak Dipenda harus teliti dalam melakukan pendataan terhadap wajib pajak.



Mengenai Rekapitulasi jawaban responden tentang bimbingan pembinaan terhadap wajib pajak daerah, dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel V.14 Rekapitulasi Pendaftaran dan Pendataan Terhadap Wajib Pajak**

No	Pertanyaan	Kategori penilaian			Jumlah
		Iya	Kadang-kadang	Tidak	
1.	Apakah pendaftaran wajib pajak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.	25 41,6%	33 55,1%	2 3,3%	60 (100%)
2	Apakah seluruh subjek pajak sudah terdata secara keseluruhan di Kabupaten rokan hilir	17 28,3%	23 38,3%	20 33,3%	60 (100%)
3	Apakah diadakan penyusunan secara objektif oleh pihak aparat berdasarkan kenyataan yang ada	12 50%	18 30%	30 20%	60 (100%)
4	Apakah pengumpulan data tersebut telah dilakukan secara optimal dan objektif setiap subjek dan objek pajak yang ada	24 40,1%	22 36,6%	14 23,3%	60 (100%)
5	Apakah pihak dipenda pernah salah dalam penulisan identitas wajib pajak	10 16,6%	15 33,3%	35 50,1%	60 (100%)
	Jumlah	176,6	193,3	233,3	100%
	Rata-rata	35,32	36,66	46,66	100%

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari hasil rekapitulasi tabel diatas dapat diketahui peran dipenda dalam melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak Dari tabel di atas yakni dari 60 Responden terdapat 35,32% responden yang mengatakan iya, sedangkan 36,66% responden mengatakan kadang-kadang, dan terdapat 46,66% Rresponden mengatakan tidak. Hal ini dapat dilihat bahwa peran dipenda dalam melakukan

pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak yang di Kabupaten Rokan Hilir belum seluruhnya terdata.

### **3. Melakukan Pembukuan dan Pelaporan Hasil Pembuatan Pajak Daerah**

Dalam melakukan pembukuan dan pelaporan sebagai mana dinyatakan terdahulu, bahwa apabila kegiatan pendaftaran dan pendataan terhadap subjek dan objek pajak telah dilakukan, maka pihak Dipenda harus benar-benar melakukan pembukuan dan pelaporan tentang hasil dalam pemungutan atau penerimaan pajak daerah, kegiatan ini dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan penerimaan dilapangan.

Untuk dapat mengetahui lebih lanjut pelaksanaan dalam melakukan pembukuan dan pelaporan hasil dari penerimaan pajak daerah di Kabupaten Rokan Hilir, dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel V.15 Tanggapan Responden Apakah Pihak Dipenda Telah Melakukan Pencatatan akan Data-data Wajib Pajak Secara Benar**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	30	50,1%
2	Kadang-kadang	20	33,3%
3	Tidak	10	16,6%
	Jumlah	60	100 %

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari tabel diatas menunjukan peran Dipenda dalam melakukan pembukuan dan pelaporan hasil pajak daerah, 30 responden (50,1%) mengatakan iya, sebanyak 20 responden (33,3%) mengatakan kadang-kadang, dan 10 responden (16,6%) yang mengatakan tidak.

Sedangkan untuk mengetahui apakah pihak Dipenda membuat laporan Realisasi penerimaan yang diajukan kepada pimpinan. Ini dapat dilihat dari tabel berikut

**Tabel V.16 Tanggapan Responden Apakah Pihak Dipenda Membuat laporan Realisasi Penerimaan Yang diajukan Kepada Pimpinan.**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	30	50%
2	Kadang-kadang	17	28,4%
3	Tidak	13	21,6%
	Jumlah	60	100 %

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari tabel diatas menunjukkan peran Dipenda dalam melakukan pembukuan dan pelaporan hasil pajak daerah, dari 60 responden terdapat 30 responden (50%) mengatakan iya, sebanyak 17 responden (28,3%) mengatakan kadang-kadang, dan 13 responden (21,6%) yang mengatakan tidak.

Sedangkan untuk mengetahui apakah laporan dilakukan secara rutin dan teratur. Ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel V.17 Tanggapan Responden Apakah laporan dilakukan Secara Rutin dan Teratur**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	14	23,3%
2	Kadang-kadang	22	36,6%
3	Tidak	24	40,1%
	Jumlah	60	100 %

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari tabel diatas dari 60 responden terdapat 14 responden (23,3%) mengatakan iya, sebanyak 22 responden (40,1%) mengatakan kadang-kadang, dan 22 responden (40,1%) yang mengatakan tidak.

Sedangkan untuk mengetahui apakah pelaporan hasil pembuatan pajak dilakukan setiap tahunnya. Ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel V.18 Tanggapan Responden Apakah Pelaporan Hasil Pembuatan Pajak dilakukan Setiap Tahunnya**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	20	33,3%
2	Kadang-kadang	30	50%
3	Tidak	10	16,7%
	Jumlah	60	100 %

*Sumber: Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari tabel diatas menunjukan peran Dipenda dalam melakukan pembukuan dan pelaporan hasil pajak daerah, 20 responden (33,3%) mengatakan iya, sebanyak 30 responden (50%) mengatakan kadang-kadang, dan 10 responden (16,7%) yang mengatakan tidak.

Sedangkan untuk mengetahui apakah laporan atau pembukuan itu sangat penting. Ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel V.19 Tanggapan Responden Apakah laporan atau Pembukuan Sangat Penting**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	35	58,3%
2	Kadang-kadang	23	38,3%
3	Tidak	2	3,3%
	Jumlah	60	100 %

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari tabel diatas menunjukan peran Dipenda dalam melakukan pembukuan dan pelaporan hasil pajak daerah, 35 responden (58,3%) mengatakan iya, sebanyak 23 responden (38,3%) mengatakan kadang-kadang, dan hanya 2 responden (3,3%) yang mengatakan tidak.

**Tabel V.20 Rekapitulasi Pembukuan dan Pelaporan Hasil Pembuatan Pajak daerah**

No	Pertanyaan	Kategori penilaian			Jumlah
		Iya	Kadang-kadang	Tidak	
1.	Apakah pihak dipenda telah melakukan pencatatan akan data-data wajib pajak secara benar .	30 50%	20 33,4%	10 16,6%	60 (100%)
2	Apakah pihak dipenda membuat laporan realisasi penerimaan yang diajukan kepada pimpinan	30 50%	17 28,4%	13 21,6%	60 (100%)
3	Apakah laporan dilakukan secara rutin dan teratur	14 23,3%	22 36,6%	24 40,1%	60 (100%)
4	Apakah pelaporan hasil pembuatan pajak dilakukan setiap tahunnya	20 33,3%	30 50%	10 16,6%	60 (100%)
5	Apakah laporan atau pembukuan sangat penting	35 58,3%	23 38,3%	2 3,4%	60 (100%)
	Jumlah	214,9	136,7	98,3	100%
	Rata-rata	42,98	27,34	19,66	100%

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari hasil rekapitulasi tabel diatas dapat diketahui peran dipenda dalam melakukan pembukuan dan pelaporan hasil pembuatan pajak. Dari tabel di atas yakni dari 60 Responden terdapat 42,98% responden yang mengatakan iya, sedangkan 27,34% responden mengatakan kadang-kadang, dan terdapat 19,66% Rresponden mengatakan tidak. Hal ini dapat dilihat bahwa peran dipenda dalam melakukan

pembukuan dan pelaporan pembuatan pajak daerah hampir sudah berjalan dengan baik, walupun belum maksimal.

#### **4. Melakukan Pengawasan terhadap penagihan pajak daerah**

Usaha dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan mengadakan pengawasan terhadap tugas yang dilakukan dalam penerimaan pajak daerah, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat penting dan perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran pelaksanaan yang telah dilakukan dalam usaha pencapaian tujuan.

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengawasan dalam penerimaan pajak, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.21 Tanggapan Responden apakah Dipenda pernah melakukan pengawasan yang optimal terhadap penagihan pajak daerah**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	12	20,1%
2	Kadang-kadang	22	36,6%
3	Tidak	26	43,3%
	Jumlah	60	100 %

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan iya sebanyak 12 responden (20,1%) sedangkan yang mengatakan kadang-kadang sebanyak 22 responden (36,6%) dan 26 responden (43,3%) menyatakan tidak.

Sedangkan untuk mengetahui apakah pengawasan tersebut dilakukan secara teratur oleh pihak Dipenda. Ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel V.22 Tanggapan Responden apakah pengawasan dilakukan secara teratur oleh pihak Dipenda**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	14	23,3%
2	Kadang-kadang	18	30,1%
3	Tidak	28	48,6%
	Jumlah	60	100 %

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan iya sebanyak 14 responden (23,3%) sedangkan yang mengatakan kadang-kadang sebanyak 18 responden (46,6%) dan 28 responden (30,1%) lagi menyatakan tidak.

Sedangkan untuk mengetahui apakah dalam pengawasan terhadap penagihan pajak dilakukan oleh seluruh pegawai Dipenda. Ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel V.23 Tanggapan Responden apakah dalam pengawasan terhadap penagihan pajak dilakukan oleh seluruh pegawai Dipenda**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	14	23,3%
2	Kadang-kadang	22	36,6%
3	Tidak	22	36,6%
	Jumlah	60	100 %

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan Iya sebanyak 14 responden (23,3%) sedangkan yang mengatakan kadang-kadang sebanyak 22 responden (36,6%) dan 22 responden (36,6%) menyatakan tidak.

Sedangkan untuk mengetahui apakah pengawasan penagihan terhadap pajak diperlukan pegawai yang bagus. Ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel V.24 Tanggapan Responden apakah pengawasan penagihan terhadap pajak diperlukan pegawai yang bagus**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	8	13,3%
2	Kadang-kadang	24	40,1%
3	Tidak	28	46,6%
	Jumlah	60	100 %

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan iya sebanyak 8 responden (13,3%) sedangkan yang mengatakan kadang-kadang sebanyak 24 responden (40,1%) dan 28 responden (46,6%) menyatakan tidak.

Sedangkan untuk mengetahui apakah dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak pihak Dipenda pernah mengalami kesulitan. Ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel V.25 Tanggapan Responden apakah dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak pihak Dipenda pernah mengalami kesulitan.**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	8	10,1%
2	Kadang-kadang	20	33,3%



3	Tidak	34	56,6%
	Jumlah	60	100 %

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan iya hanya sebanyak 8 responden (10,1%) sedangkan yang mengatakan kadang-kadang sebanyak 20 responden (33,3%) dan 34 responden (56,6%) menyatakan tidak.

**Tabel V.26 Rekapitulasi Pemeriksaan dan Pengawasan terhadap Penagihan Pajak Daerah**

No	Pertanyaan	Kategori penilaian			Jumlah
		Iya	Kadang-kadang	Tidak	
1.	Apakah dipenda pernah melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang optimal terhadap penagih-an pajak daerah .	12 20,1%	22 36,6%	26 43,3%	60 (100%)
2	Apakah pengawasan dilakukan secara teratur oleh pihak dipenda	14 23,3%	18 30,1%	28 48,6%	60 (100%)
3	Apakah dalam pengawasan terhadap penagihan pajak dilakukan oleh seluruh pegawai dipenda	14 23,3%	22 36,6%	22 36,6%	60 (100%)
4	Apakah pengawasan penagihan terhadap pajak diperlukan pegawai yang bagus	8 13,3%	24 40,1%	28 46,6%	60 (100%)
5	Apakah dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak pihak dipenda pernah mengalami kesulitan	8 10,1%	20 33,3%	34 56,6%	60 (100%)
	Jumlah	90,1	176,7	23,17	100%
	Rata-rata	18,02	35,34	46,34	100%

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari hasil rekapitulasi tabel diatas dapat diketahui peran dipenda dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap penagihan pajak daerah. Dari tabel di atas yakni dari 60 Responden terdapat 18,02 responden yang mengatakan iya, sedangkan 35,34% responden mengatakan kadang-kadang, dan terdapat 46,34% Rresponden mengatakan tidak. Hal ini dapat dilihat bahwa peran dipenda dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap penagihan pajak belum berjalan dengan baik.

## 5. Melakukan Penyuluhan-Penyuluhan Mengenai Pajak Daerah

Kegiatan penyuluhan merupakan program kerja dilapangan yang ditunjukan terhadap wajib pajak daerah, dalam rangka menyadarkan tentang arti pentingnya pajak daerah dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Namun kenyataan peran Dipenda dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai pajak daerah kurang ditanggapi oleh wajib pajak karena masih banyak wajib pajak yang melanggar ketentuan dalam membayar pajak, serta masih terdapat wajib pajak yang tidak membayar pajak.

Untuk mengetahui kegiatan Dipenda dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**TabelV.27 Tanggapan Responden apakah penyuluhan-penyuluhan mengenai pajak daerah dilakukan setiap tahunnya**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
----	---------------------	--------	------------

1	Iya	8	13,4%
2	Kadang-kadang	20	33,3%
3	Tidak	32	53,3%
	Jumlah	60	100 %

*Sumber: Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari tabel diatas peran Dipenda dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap wajib pajak daerah Kabupaten Rokan Hilir belum berjalan dengan baik, yakni dilihat tanggapan responden menyatakan iya sebanyak 8 responden atau (13,4%), sedangkan yang menyatakan kadang-kadang sebanyak 20 responden atau (33,3%) dan yang paling sedikit adalah yang menyatakan tidak sebanyak 32 responden atau (53,3%).

Sedangkan untuk mengetahui apakah penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan pihak Dipenda bisa dipahami oleh wajib pajak. Ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel V.28 Tanggapan Responden apakah penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan pihak Dipenda bisa dipahami oleh wajib pajak**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	16	26,6%
2	Kadang-kadang	16	26,6%
3	Tidak	28	46,6%
	Jumlah	60	100 %

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan iya sebanyak 16 responden (26,6%) sedangkan yang mengatakan kadang-kadang sebanyak 16 responden (26,6%) dan 16 responden (46,6%) menyatakan tidak.

**Tabel V.29 Tanggapan Responden apakah penyuluhan yang dilakukan Dipenda terhadap wajib pajak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	14	23,3%
2	Kadang-kadang	20	33,3%
3	Tidak	26	43,4%
	Jumlah	60	100 %

*Sumber : Data Olahan dari hasil 2010*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan iya sebanyak 14 responden (23,3%) sedangkan yang mengatakan kadang-kadang sebanyak 20 responden (33,3%) dan 26 responden (43,4%) menyatakan tidak.

Sedangkan untuk mengetahui apakah dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan apakah pihak Dipenda pernah mengalami kesulitan. Ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel V.30 Tanggapan Responden apakah dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan apakah pihak Dipenda pernah mengalami kesulitan**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	10	16,6%
2	Kadang-kadang	16	26,6%
3	Tidak	34	56,6%
	Jumlah	60	100 %

*Sumber : Data Olahan dari hasil 2010*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan iya 10 responden (16,6%) sedangkan yang mengatakan kadang-kadang sebanyak 16 responden (26,6%) dan 34 responden (56,6%) menyatakan tidak.

Sedangkan untuk mengetahui apakah penyuluhan pajak daerah yang dilakukan Dipenda sudah berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat dari tabel berikut

**Tabel V.31 Tanggapan Responden apakah penyuluhan pajak daerah yang dilakukan Dipenda sudah berjalan dengan optimal**

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	6	10,1%
2	Sebagian	20	33,3%
3	Tidak	34	56,6%
	Jumlah	60	100 %

*Sumber : Data Olahan dari hasil 2010*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan iya sebanyak 6 responden (10,1%) sedangkan yang mengatakan sebagian sebanyak 20 responden (33,3%) dan 34 responden (56,6%) menyatakan tidak.

**Tabel V.32 Rekapitulasi Penyuluhan-penyuluhan Mengenai Pajak Daerah**

No	Pertanyaan	Kategori penilaian			Jumlah
		Iya	Kadang-kadang	Tidak	
1.	Apakah penyuluhan mengenai pajak daerah dilakukan setiap tahunnya .	8 13,4%	20 33,3%	32 53,3%	60 (100%)
2	Apakah penyuluhan yang dilakukan pihak dipenda bisa dipahami oleh wajib pajak	16 26,6%	16 26,6%	28 46,6%	60 (100%)
3	Apakah penyuluhan yang dilakukan dipenda terhadap wajib pajak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku	14 23,3%	20 33,3%	26 43,4%	60 (100%)
4	Apakah pihak dipenda turun langsung kelapangan untuk melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak	4 6,6%	16 26,6%	40 66,6%	60 (100%)
5	Apakah penyuluhan pajak	6	20	34	60

	daerah yang dilakukan dipenda sudah berjalan dengan optimal	10,1%	33,3%	56,6%	(100%)
	Jumlah	80%	153,1	266,5	100%
	Rata-rata	13,33	30,62	53,30	100%

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Dari hasil rekapitulasi tabel diatas dapat diketahui peran dipenda dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap penagihan pajak daerah. Dari tabel di atas yakni dari 60 Responden terdapat 13,33 responden yang mengatakan iya, sedangkan 30,62% responden mengatakan kadang-kadang, dan sebanyak 53,30% Rresponden mengatakan tidak. Hal ini dapat dilihat bahwa peran dipenda dalam melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak daerah belum dilakukan atau belum berjalan maksimal.

Ini membuktikan bahwa peran yang dilakukan Dipenda terhadap wajib pajak belum berjalan maksimal ini dapat dilihat dari beberapa tabel diatas. Mengenai Rekapitulasi jawaban responden tentang pelaksanaan peran Dipenda dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.33 Rekapitulasi jawaban Responden tentang Peran Dipenda dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah**

No	Variabel	Klasifikasi tanggapan responden			Jumlah
		Iya	Kadang-kadang	Tidak	
1	Melakukan Bimbingan Pembinaan terhadap Wajib Pajak	14 22,63 %	19 32,02%	27 44,66%	100%
2	Melakukan Pendaftaran dan Penda-	21 35,32%	23 36,66%	16 26,66%	100%

3	taan terhadap wajib pajak Daerah Melakukan Melakukan Pembukua- n dan Pelaporan Pajak Daerah	26 42,98%	15 27,34%	19 19,66%	100%
4.	Melakukan pengawasan terhadap penagihan pajak daerah	11 18,02%	21 35,34%	28 46,34%	100%
5	Melakukan Penyuluhan-Penyuluh- an Mengenai Pajak Daerah	10 16,06%	18 30,62%	32 53,30%	100%
	Jumlah	<u>136,01</u>	<u>161,98</u>	<u>190,62</u>	100%
	Rata-rata	$\frac{5}{= 27,25}$	$\frac{5}{= 32,39}$	$\frac{5}{= 38,12}$	

*Sumber : Data Olahan dari hasil penelitian 2010*

Sesuai dengan hasil Rekapitulasi maka dapat diketahui bahwa peran Dipenda dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah belum berjalan maksimal. Ini membuktikan bahwa rekapitulasi jawaban responden paling banyak

menyatakan tidak sebanyak 38,12 % sedangkan yang menyatakan kadang-kadang sebanyak 32,39 % responden dan menyatakan iya hanya 27,25 % responden.

Dari analisa yang penulis lakukan tentang peranan Dipenda dalam penerimaan pajak daerah dimana telah diuraikan diatas maka diketahui peranan Dipenda yang telah dilaksanakan Iya, kadang-kadang, tidak. Dalam hal ini penerimaan pajak daerah yang dilaksanakan termasuk pada kategori tidak baik.

### **V.3 Hambatan-hambatan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Rokan Hilir**

Keberhasilan pemerintah daerah dalam memobilisasi dana salah satunya dapat dilihat dari peningkatan penerimaan pajak daerah yang secara dipercayakan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Dalam penerimaan pajak daerah Kabupaten Rokan Hilir masih banyak mengalami hambatan-hambatan.

Dalam upaya melakukan peningkatan penerimaan pajak, pihak Dinas pendapatan daerah Rokan Hilir selaku unsur pelaksanaan pendapatan daerah harus melakukan sistem kerja yang baik, teratur strategik, dan bertanggung jawab.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerimaan pajak daerah ada dua yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

1. Faktor internal yaitu faktor dari dalam Dipenda itu sendiri, diantaranya :

- a. Pimpinan atau kepala dinas pendapatan daerah kabupaten rokan hilir belum maksimal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pegawai lapangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan penerimaan pajak daerah melainkan hanya menerima laporan saja tanpa menganalisa dan mengevaluasi laporan yang diberikan oleh pegawainya.
- b. Kurangnya pantauan atau pendataan yang dilakukan petugas-petugas lapangan terhadap wajib pajak atau objek pajak yang ada diRokan Hilir, sehingga belum terdatanya keseluruhan objek pajak yang ada diRokan Hilir.
- c. Walaupun pajak daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan pajak daerah dalam memberikan



pengawasan atau penyuluhan pihak Dipenda belum bisa melakukannya dengan baik.

2. Faktor eksteran yaitu faktor dari luar Dipenda, antara lain :

- a. Majib pajak belum mengetahui arti pentingnya pajak, sehingga wajib pajak enggan membayarkan pajaknya kepada dinas pendapatan daerah Rokan Hilir
- b. Belum adanya kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan daerah atau ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga belum adanya kesadaran untuk membayar pajaknya. Padahal pajak tersebut berguna bagi diri dan kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.
- c. Jangkauan wajib pajak terlalu jauh sehingga menyulitkan pihak Dipenda dalam melakukan penyuluhan bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak daerah.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **VI.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka sudah tibalah saatnya penulis untuk membuat sebuah kesimpulan dan saran dari apa yang telah penulis uraikan dari penelitian yang telah penulis lakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah belum berjalan maksimal, hal ini dikarenakan bahwa Dipenda belum bisa berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Ini bisa dilihat dari peran Dipenda dalam memberi bimbingan pembinaan terhadap wajib pajak daerah, melakukan pendaftaran, melakukan pembukuan dan pelaporan, melakukan pengawasan dan melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak.

1. Peranan Dipenda terhadap wajib pajak belum berjalan dengan baik, ini dapat dilihat dari penilaian atau evaluasi yang dilakukan Dipenda Kabupaten Rokan Hilir, dalam melakukan bimbingan pembinaan terhadap wajib pajak daerah, yang menyatakan iya hanya 22,65% sedangkan yang menyatakan kadang-kadang sebanyak 32,02% dan yang menyatakan tidak sebanyak 44,66%,
2. Sedangkan dalam melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dari 60 responden yang menyatakan iya sebanyak 35,32% sedangkan yang menyatakan kadang-kadang sebanyak 36,66% dan 46,66% menyatakan tidak.

3. Dalam melakukan pembukuan dan pelaporan pajak daerah dari 60 responden yang menyatakan iya sebanyak 42,32% yang menyatakan kadang-kadang sebanyak 27,34% dan yang menyatakan tidak sebanyak 19,66%. ini menyatakan dalam melakukan pembukuan dan pelaporan pajak daerah pihak Dipenda belum bisa melaksanakannya dengan baik
4. Sedangkan dalam melakukan pengawasan terhadap penagihan pajak daerah dari 60 responden yang menyatakan iya sebanyak 18,02% sedangkan yang menyatakan kadang-kadang sebanyak 35,34% dan yang menyatakan tidak sebanyak 46,34%. Berarti pihak dipenda belum bisa melakukan pengawasan yang optimal terhadap wajib pajak.
5. Dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai pajak daerah dari 60 responden yang menyatakan iya sebanyak 13,33% sedangkan yang menyatakan kadang-kadang sebanyak 30,62% dan menyatakan tidak sebanyak 53,30 %. Dalam melakukan penyuluhan pihak Dipenda belum melakukannya kepada wajib pajak secara keseluruhan.

## **VI.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan bagi instansi pemerintahan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

1. Hendaknya pihak Dipenda lebih mengoptimalkan kerja serta mengali potensi yang dimiliki tersebut dengan semaksimal mungkin dan memberikan bimbingan pembinaan yang lebih baik kepada wajib pajak.

2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah perlu kiranya diadakan pendidikan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan aparat dan memantapkan kualitas aparat tersebut perlu diadakan pertemuan secara priodik dengan unut-unit kerja yang diperiksa sehingga permasalahan penyimpangan akan mudah ditemukan
3. Sangsi yang di kenakan pada wajib pajak sedapat mungkin di berlakukan dengan baik agar para wajib dapat membayarkan kewajiban pajaknya tepat pada waktunya, serta para pegawai juga harus melakukan pembukuan dan pelaporan yang teratur kepada pimpinan.
4. Perlu pengawasan yang optimal oleh pihak pimpinan kepada pegawai dalam melaksanakan tugasnya supaya para wajib pajak mengikuti perturan yang telah ditetapkan oleh pihak Dipenda.
5. Para pegawai sebaiknya diberi pendidikan lagi supaya bisa mendidik para wajib pajak dalam melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri 2003, *Keuangan Negara dan Analisa Kebijakan Utan Luar Negri*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bahori, (2006), *Pengantar Hukum Pajak*, Ed. Revisi 6. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Davey ,KJ. (1998), *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, UI Prees, Jakarta
- Devas 1989, dalam Elfida (2005), *Analisa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, Sikripsi Sarjana.
- Halim, Abdul (2004), *Bunga rampai Manajemen keuangan daerah*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Ismail, Munawar (2001), *Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah*, Telaah Ekonomi Volume II.
- Siahaan, Marihot P (2005), *Pajak Daerah dan Ritribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siagian,SP (2005), *Metode Penelitian Administrasi*, Bumi Aksara.
- Saragih, Juli Panglima (2003), *Desentralisasi Fisikal dan keuangan Daerah dalam otonomi*, Ghalia indonesia, Jakarta.
- Sri Pudyatmoko,(2009), *Pengantar Hukum Pajak* , penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Sumyar, (2004), *Dasar-dasar Hukum Pajak*, Edisi pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004, *Tentang Pendapatan Asli Daerah*.

Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, *Tentang Otonomi Daerah*,  
Fokusmedia, Bandung.

Undang-undang No. 34 Tahun 2000, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah*.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2006-2007.....	6
Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2008-2009 .....	7
Tabel III.1	Populasi dan Sampel Dipenda Kabupaten Rokan Hilir.....	30
Tabel IV.1	Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Dipenda Kabupaten Rokan Hilir .....	54
Tabel IV. 2	Keadaan Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan Pada Kabupaten Rokan Hilir.....	55
Tabel IV. 3	Keadaan Pegawai Berdasarkan Masa Kerja Pada Kantor Dipenda Kabupaten Rokan Hilir.....	56
Tabel IV. 4	Keadaan Fasilitas Kerja Kantor Dipenda Rokan Hilir.....	57
Tabel V. 1	Keadaan Responden Ditinjau Dari Tingkat Golongan .....	59
Tabel V. 2	Keadaan Responden Berdasarkan Pangkat dan Jabatan .....	60
Tabel V. 3	Tanggapan Responden Apakah Kegiatan Bimbingan Pembinaan Terhadap Wajib Pajak Daerah Telah Dilakukan.....	62
Tabel V. 4	Tanggapan Responden Apakah Dipenda Mendatangi Setiap Wajib Pajak Daerah Gang Ada Secara Rutin Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Wajib Pajak .....	62
Tabel V. 5	Tanggapan Responden Apakah Pembinaan Yang Dilakukan Pihak Dipenda Sesuai Dengan Peraturan Gang Ditetapkan.....	63
Tabel V. 6	Tanggapan Responden Apakah Wajib Pajak Mau Diberi Bimbingan Pembinaan Dari Dipenda.....	63
Tabel V. 7	Tanggapan Responden Apakah Kegiatan Pembinaan Wajib Pajak Sudah Dilakukan Dengan Baik.....	64

Tabel V. 8	Rekapitulasi Bimbingan Pembinaan Terhadap Wajib Pajak.....	65
Tabel V. 9	Tanggapan Responden Apakah Pendaftaran Wajib Pajak Sesuai Dengan Kenyataan Yang Ada Dilapangan.....	66
Tabel V.10	Tanggapan Responden apakah seluruh subjek pajak sudah terdata secara keseluruhan di Kabupaten Rokan Hilir.....	67
Tabel V.11	Tanggapan Responden Apakah Diadakan Penyusunan Secara Objektif Oleh Pihak Aparat Berdasarkan Kenyataan Yang Ada.....	67
Tabel V.12	Tanggapan Responden Apakah Pengumpulan Data Tersebut Telah Dilakukan Secara Optimal dan Objektif Terhadap Setiap Subjek dan Objek Pajak Yang Ada.....	68
Tabel V.13	Tanggapan Responden Apakah Pihak Dipenda Pernah Salah Dalam Penulisan Identitas Wajib Pajak.....	68
Tabel V.14	Rekapitulasi Pendaftaran dan Pendataan Terhadap Wajib Pajak .....	69
Tabel V.15	Tanggapan Responden Apakah Pihak Dipenda Telah Melakukan Pencatatan Akan Data-Data Wajib Pajak Secara Benar.....	70
Tabel V. 16	Tanggapan Responden Apakah Pihak Dipenda Membuat Laporan Realisasi Penerimaan Yang Diajukan Kepada Pimpinan.....	71
Tabel V.17	Tanggapan Responden Apakah Laporan Dilakukan Secara Rutin dan Teratur .....	71
Tabel V.18	Tanggapan Responden Apakah Pelaporan Hasil Pembuatan Pajak Dilakukan Setiap Tahunnya.....	72
Tabel V.19	Tanggapan Responden Apakah Laporan atau Pembukuan Sangat Penting.....	72
Tabel V.20	Rekapitulasi Pembukuan dan Pelaporan Hasil Pembuatan Pajak Daerah.....	73
Tabel V.21	Tanggapan Responden Apakah Dipenda Pernah Melakukan Pengawasan Yang Optimal Terhadap Penagihan Pajak Daerah.....	74



Tabel V.22	Tanggapan Responden Apakah Pengawasan Dilakukan Secara Teratur Oleh Pihak Dipenda.....	75
Tabel V.23	Tanggapan Responden Apakah Dalam Pengawasan Terhadap Penagihan Pajak Dilakukan Oleh Seluruh Pegawai Dipenda.....	75
Tabel V.24	Tanggapan Responden Apakah Pengawasan Penagihan Terhadap Pajak Diperlukan Pegawai Yang Bagus .....	76
Tabel V.25	Tanggapan Responden Apakah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Wajib Pajak Pihak Dipenda Pernah Mengalami Kesulitan.....	76
Tabel V.26	Rekapitulasi Pemeriksaan dan Pengawasan Terhadap Penagihan Pajak Daerah.....	77
Tabel V.27	Tanggapan Responden Apakah Penyuluhan-Penyuluhan Mengenai Pajak Daerah Dilakukan Setiap Tahunnya.....	78
Tabel V.28	Tanggapan Responden apakah penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan pihak Dipenda bisa dipahami oleh wajib pajak.....	79
Tabel V.29	Tanggapan Responden apakah penyuluhan yang dilakukan Dipenda terhadap wajib pajak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.....	79
Tabel V.30	Tanggapan Responden apakah dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan apakah pihak Dipenda pernah mengalami kesulitan.....	80
Tabel V.31	Tanggapan Responden apakah penyuluhan pajak daerah yang dilakukan Dipenda sudah berjalan dengan optimal.....	80
Tabel V.32	Rekapitulasi Penyuluhan-penyuluhan Mengenai Pajak Daerah.....	81
Tabel V.33	Rekapitulasi jawaban Responden tentang Peran Dipenda dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.....	82

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BIOGRAFI



*Armika dilahirkan di Bagansiapiapi pada tanggal 17 April 1987. Lahir sebagai anak kedua dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak M. Nasir dan Ibu Mariyati. Penulis telah menamatkan beberapa jenjang pendidikan yaitu Sekolah Dasar Negeri 002 Bagansiapiapi pada tahun 1999, dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama pada SMP N 2 Bangko dan tamat pada tahun 2002, setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya pada Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Bangko dan tamat pada tahun 2005.*

*Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Pekanbaru, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2006-2010 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, akhirnya pada tanggal 22 Juni 2010 Ia berhasil mendapat gelar sarjana S.Sos dalam Ujian Munaqasyah dengan predikat terakhir Sangat Memuaskan.*

### *Motivasi*

*Semua Waktu adalah waktu yang tepat*

*Untuk melakukan sesuatu yang baik*

### *Pesan dan Kesan*

*Jangan pernah menunggu untuk*

*ditemukan.....*

*jangan pernah menanti untuk didapati .....*

*Terbitlah seperti mentari*

### **A. Data Responden**

Nama :

Usia :

Pendidikan :

- a. SLTP
- b. SLTA
- c. Perguruan Tinggi ( D3, SI, S2 )

### **B. Petunjuk Angket.**

1. Angket ini tidak bertujuan politis melainkan hanya mencari atau mendapatkan data-data penelitian tentang ” Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir”
2. Bacalah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teliti dan berilah tanda silang (x) pada salah satu alternatif jawaban yang sesuai dengan kondisi dan pemikiran bapak/ ibu.
3. Hasil dan jawaban bapak/ibu dalam angket ini akan sangat kami jaga kerahasiaannya. Karena kejujuran dalam menjawab sangat diharapkan.

### **C. Daftar Pertanyaan**

#### **I. Bimbingan Pembinaan terhadap wajib pajak daerah**

1. Apakah kegiatan Bimbingan Pembinaan terhadap wajib pajak daerah telah dilakukan oleh pihak Dipenda ?
  - a. ya
  - b. Kadang-kadang
  - c. Tidak

2. Apakah petugas Dipenda mendatangi setiap wajib pajak daerah yang ada secara rutin dalam melakukan pembinaan terhadap wajib pajak ?  
a. ya                      b. kadang-kadang                      c. Tidak
3. Menurut Bapak/Ibu apakah pernah pembinaan yang dilakukan pihak dipenda sesuai dengan peraturan yang ditetapkan ?  
a. ya                      b. Kadang-kadang                      c. Tidak
4. Apakah wajib pajak mau diberi bimbingan pembinaan dari Dipenda?  
a. ya                      b. Kadang-kadang                      c. Tidak
5. Apakah kegiatan pembinaan wajib pajak sudah dilakukan dengan baik?  
a. ya                      b. Kadang-kadang                      c. Tidak

## II. Pendaftaran dan Pendataan wajib pajak dan retribusi daerah

1. Apakah pendaftaran wajib pajak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan ?  
a. ya                      b. kadang-kadang                      c. tidak
2. Apakah seluruh subjek pajak sudah terdata secara keseluruhan dikabupaten Rokan Hilir ?  
a. ya                      b. sebagian                      c. tidak
3. Setelah data terkumpul, apakah diadakan penyusunan secara objektif oleh pihak aparat berdasarkan kenyataan yang ada ?  
a. ya                      b. kadang-kadang                      c. tidak
4. Menurut bapak/ibu apakah pengumpulan data tersebut telah dilakukan secara optimal dan objektif terhadap setiap subjek dan objek yang ada ?  
a. ya                      b. kadang-kadang                      c. tidak

5. Dalam melakukan pendaftaran atau pendataan apakah pihak Dipenda pernah salah dalam penulisan identitas wajib pajak?

- a. ya                      b. Kadang-kadang                      c. Tidak

### III. Pembukuan dan Pelaporan hasil pembuatan pajak

1. Apakah pihak Dipenda telah melakukan pencatatan akan data-data wajib secara benar ?

- a. ya                      b. kadang-kadang                      c. tidak

2. Didalam kegiatan pembukuan, apakah pihak Dipenda membuat laporan realisasi penerimaan yang diajukan kepada pimpinan ?

- a. ya                      b. kadang-kadang                      c. tidak

3. Apakah laporan itu dilakukan secara rutin dan teratur ?

- a. ya                      b. kadang-kadang                      c. tidak

4. Apakah pelaporan hasil pembuatan pajak dilakukan setiap tahunnya ?

- a. ya                      b. kadang-kadang                      c. tidak

5. Menurut bapak/ibu apakah laporan atau pembukuan itu sangat penting ?

- a. ya                      b. kadang-kadang                      c. tidak

### IV. Pengawasan terhadap penagihan pajak daerah

1. Apakah pihak Dipenda pernah melakukan pengawasan yang optimal terhadap penagihan pajak daerah ?

- a. ya                      b. kadang-kadang                      c. tidak

2. Apakah pengawasan tersebut dilakukan secara teratur oleh pihak Dipenda?

- a. ya                      b. kadang-kadang                      c. tidak

3. Siapa-siapa yang terlibat dalam pengawasan terhadap penagihan pajak, apakah seluruh pegawai atau sebagian ?  
a. ya                      b. kadang-kadang                      c. tidak
4. Apakah dalam pengawasan penagihan terhadap pajak diperlukan pegawai yang bagus?  
a. ya                      b. kadang-kadang                      c. tidak
5. Dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak apakah pihak Dipenda pernah mengalami kesulitan ?  
a. ya                      b. kadang-kadang                      c. Tidak

#### V. Penyuluhan-penyuluhan mengenai pajak daerah

1. Berapa kali dalam setahun penyuluhan-penyuluhan mengenai pajak daerah dilakukan?  
a. 3 kali setahun                      b. 2 kali setahun                      c. 1 tahun sekali
2. Menurut bapak/ibu apakah penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan pihak Dipenda bisa dipahami oleh wajib pajak ?  
a. ya                      b. kadang-kadang                      c. tidak
3. Apakah penyuluhan yang sudah dilakukan Dipenda terhadap wajib pajak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?  
a. ya                      b. sebagian                      c. tidak
4. Dalam melakukan penyuluhan apakah pihak Dipenda pernah mengalami kesulitan ?  
a. ya                      b. kadang-kadang                      c. tidak

5. Apakah penyuluhan pajak daerah yang dilakukan Dipenda sudah berjalan dengan optimal?

a. ya

b.sebagian

c.tidak